

ketersediaan infrastruktur

by Siti Rohima

Submission date: 04-Mar-2020 12:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 1268960567

File name: ISI_BUKU-1.docx (479.3K)

Word count: 8975

Character count: 61301

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia yang merupakan negara agraris menjadikan sektor pertanian sangat penting dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan sektor pertanian memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan nasional dan penyedia pangan nasional. Pangan sebagai salah satu jenis kebutuhan fisiologis menempati herarki pertama dalam jenis-jenis kebutuhan dasar manusia. Pangan dikatakan sebagai kebutuhan dasar bagi setiap manusia dimanapun, karena berkaitan dengan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan manusia.

Proses pembangunan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Pencapaian kesejahteraan dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ketersediaan kebutuhan barang dan jasa dalam masyarakat, serta terciptanya stabilitas perekonomian. Hal-hal tersebut mencerminkan dinamika perekonomian yang ditandai oleh semakin tingginya volume aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, implikasi penting dari semakin meningkatnya volume kegiatan ekonomi masyarakat adalah semakin bertambahnya persoalan yang terkait dengan kesenjangan pendapatan, kemiskinan, dan juga kerawanan pangan. Oleh karena itu diupayakan adanya peningkatan ketahanan pangan.

Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan, karena pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Adanya pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, membutuhkan ketersediaan pangan dari hasil pertanian yang cukup guna memantapkan ketahanan pangan suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan ketahanan pangan memiliki posisi sentral dalam peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas hidup warga negara. Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi masyarakat agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Ketahanan pangan juga dimaknai sebagai hadirnya stabilitas harga beras, ketersediaan suplai beras dunia yang berlimpah, swasembada pangan, dan ketersediaan devisa sebagai persyaratan untuk memenuhi impor beras (Damanik, 2016).

Departemen Pertanian Amerika Serikat dalam Konferensi Pangan Dunia tahun 1996 memberikan definisi standar dimana ketahanan pangan akan eksis ketika semua orang dalam setiap waktu memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap kecukupan pangan untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka untuk kehidupan yang produktif dan sehat. Ketahanan pangan memiliki tiga dimensi yang saling berkait, yaitu pertama, ketersediaan kuantitas pangan

dengan kualitas yang baik yang disuplai baik melalui produksi domestik maupun impor. Kedua, aksesibilitas masyarakat terhadap sumberdaya untuk memperoleh kecukupan pangan dan gizi. Ketiga, utilisasi makanan melalui kecukupan pangan, air, sanitasi, dan kesehatan (USDA, 1996).

Dimensi lain yang juga penting adalah adanya stabilisasi harga pangan. ¹ Apabila salah satu dari dimensi-dimensi tersebut tidak terpenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. Demikian pula, walaupun ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat dapat dikatakan cukup, namun jika stabilitas harga pangan tidak mampu terjaga dengan baik maka akan berakibat pada ketersediaan dan aksesibilitas, sehingga ketahanan pangan tidak dapat dikatakan telah cukup kuat. Ketersediaan pangan juga mencakup kuantitas dan kualitas bahan pangan agar setiap individu dapat terpenuhi standar kebutuhan kalori dan energi untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan peningkatan standar hidup sumberdaya manusia.

Ketahanan pangan berguna untuk mengawasi aspek penting individu dalam rumah tangga, untuk mendisain, mengimplementasikan, serta untuk mengevaluasi kebijakan, program maupun proyek. Keterkaitan antara akses rumah tangga terhadap bahan pangan (ketahanan pangan) ; kebutuhan rumah tangga terhadap bahan pangan; serta perilaku alokasi bermakna bahwa ketahanan pangan rumah tangga memiliki keterbatasan nilai sebagai indikator dari ketahanan pangan individu (Andersen, 2009).

Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat melalui indikator penting yaitu pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. ⁶ Setiap negara akan berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan. Di banyak negara di dunia syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. GKM merupakan nilai pengeluaran keutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari, sedangkan GKNM menunjukkan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan September 2016 tercatat sebesar 76,04 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2016 yaitu sebesar 76,51 persen. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, gula pasir, mie instan, daging sapi dan cabe merah. Sedangkan komoditi bukan makanan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi.

Secara administratif, Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tigabelas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, dengan Palembang sebagai ibukota provinsi. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan.

Gambar 1.1 Peta wilayah Provinsi Sumatera Selatan



Provinsi Sumatera Selatan memiliki 13 Kabupaten, 4 Kotamadya, 212 Kecamatan, 354 Kelurahan, 2.589 Desa. Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Kabupaten dengan luas wilayah terbesar dengan luas 16.905,32 Ha, diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah sebesar 14.477 Ha.

Pemerintah daerah memerlukan informasi kemiskinan menurut sektor ekonomi untuk membuat kebijakan investasi yang berbasis kemiskinan, guna mempercepat program pengentasan kemiskinan termasuk Provinsi Sumatera Selatan. Secara terperinci, dilihat dari jumlah penduduk miskin di provinsi Sumatera Selatan tahun 2006-2015 berjumlah lebih dari satu juta jiwa. Tahun 2006-2013 tingkat kemiskinan menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun 2014 dan 2015 yang mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 1.085,8 juta jiwa di tahun 2014 dan 1.145,6 juta jiwa di tahun 2015 dengan besarnya persentase 13,62 persen tahun 2014 dan 14,25 persen tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1.043,6 juta jiwa dengan persentase 13,48 persen di tahun 2013 (BPS, 2015). Saat ini persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan masih cukup tinggi, mencapai 14,80, angka ini terpaut jauh dari target nasional pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,5 persen.

Salah satu karakteristik penduduk miskin secara spesifik sebagian besar tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian dominan berusaha sendiri di sektor pertanian (Pasaribu, 2006) dan pengembangan sektor pertanian menjadi sangat penting dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan (Yudhoyono, 2004, Datt dan Ravallion, 1996, serta Matsuyama, 1992). Pertanian menjadi sektor yang diharapkan mampu mengurangi kemiskinan, tetapi alokasi anggaran untuk sektor pertanian masih sangat kecil. Tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan disebabkan kebijakan pembangunan bias perkotaan dan sektor industri, sementara alokasi anggaran sektor pertanian menurun drastis (Sajogyo, 2002). Menurut Mubyarto (1991) sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dalam perekonomian nasional karena kontribusinya yang cukup besar dalam pendapatan nasional, penghasilan devisa melalui kegiatan ekspor produk pertanian. Sektor pertanian merupakan penyediaan bahan pangan dan menjadi penyedia bahan baku sektor industri. Selain itu, sektor pertanian juga mampu memberikan lapangan pekerjaan pada penduduk yang selalu bertambah dengan cepat.

Demikian halnya Provinsi Sumatera Selatan menggiatkan pembangunan di sector pertanian karena potensi sumberdaya pertanian yang melimpah di wilayah ini. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan dan dikembangkan untuk ketahanan pangan masyarakat Sumatera Selatan. Sumber pangan lokal di Provinsi Sumatera Selatan antara lain tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Produksi padi di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 mengalami peningkatan 588,67 ribu ton (16,04 persen) dari

tahun sebelumnya, dan mencapai 4.259.104 ton. Peningkatan produksi disebabkan oleh meningkatnya luas panen sebesar 60,92 ribu ha (7,51 persen) dan produktivitas naik sebesar 3,59 ku/ha (7,93 persen). Pada Pulau Sumatera, dari 10 provinsi yang ada, Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi penghasil padi tertinggi kedua setelah Sumatera Utara. Kontribusi produksi padi di provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 sebesar 5,43 persen terhadap produksi padi Nasional (BPS, 2015). Salah satu upaya dalam mendorong produksi dan produktivitas pangan adalah tersedianya infrastruktur pertanian yang memadai. Pembangunan infrastruktur yang saat ini diperlukan antara lain berupa perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengairan, seperti waduk dan saluran irigasi, serta pembangunan jalan yang menghubungkan sentra produksi kepada konsumen akhir. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi (BKP, 2015).

Dalam hal peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan mewujudkan ketersediaan infrastruktur tersebut, dukungan dan koordinasi antara instansi yang membidangi pembangunan fisik serta pemerintah daerah melalui dukungan kebijakan yang mempermudah implementasi pembangunan tersebut, mutlak diperlukan. Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian juga memerlukan dukungan penyediaan teknologi, dan harus sejalan dengan upaya pengurangan kemiskinan serta ketahanan pangan.

BAB II TEORI DAN KONSEP

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*)

Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*) dipelopori oleh North (1995) dan kemudian dikembangkan oleh Tiebout (1956). Teori ini membagi sektor produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat di dalam suatu wilayah atas pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan service (non-basis). Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat *exogenous* artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah tersebut dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan kegiatan non-basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri.

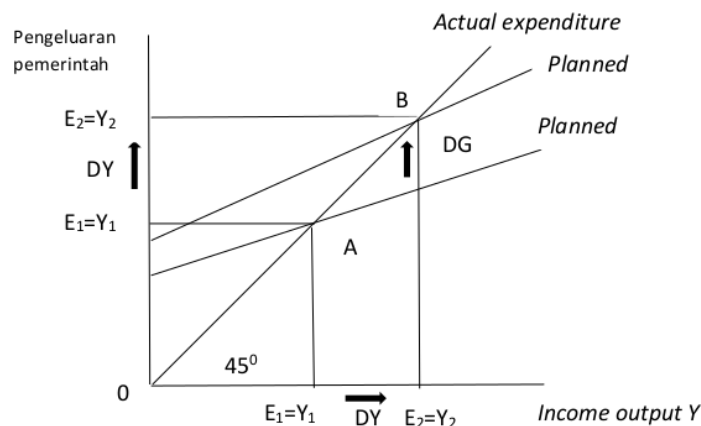
Teori basis ekspor menggunakan dua asumsi, yaitu asumsi pokok atau yang utama bahwa ekspor adalah satu-satunya unsur eksogen (*independent*) dalam pengeluaran, artinya semua unsur pengeluaran lain terikat (*dependent*) terhadap pendapatan. Secara tidak langsung hal ini berarti diluar pertambahan alamiah, hanya peningkatan ekspor saja yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah karena sektor lain terikat oleh peningkatan pendapatan daerah. Sektor lain hanya meningkat apabila pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat. Asumsi kedua adalah bahwa fungsi pengeluaran dan fungsi impor bertolak dari titik nol sehingga tidak akan berpotongan. Teori inilah yang mendasari pemikiran teknik LQ, yaitu teknik yang membantu dalam menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat ke swasembada (*Self-sufficiency*) suatu sektor. Model teori basis ini adalah sederhana, sehingga memiliki kelemahan-kelemahan antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Richardson, besarnya basis ekspor adalah fungsi terbalik dari besarnya suatu daerah. Artinya, makin besar suatu daerah maka ekspornya akan semakin kecil apabila dibandingkan dengan total pendapatan.
2. Ekspor jelas bukan satu-satunya faktor yang dapat meningkatkan pendapatandaerah. Ada banyak unsur lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah seperti : pengeluaran atau bantuan pemerintah pusat, investasi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

2.1.2. Pengeluaran Pemerintah

Dalam buku Ilyas (1989) pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, pengeluaran tersebut bertujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan pengertian Pengeluaran Pemerintah menurut Sukirno (2011) adalah sebagai Pengeluaran pemerintah adalah perbelanjaan pemerintah ke atas barang-barang modal, barang konsumsi dan ke atas jasa-jasa. Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah belanja pemerintah terhadap barang dan jasa. Menurut pendapat Keynes (Sukirno, 2011) bahwa **peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja dan pengangguran dan tingkat harga.** Hubungan antara **pengeluaran pemerintah** dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam *Keynesian Cross* (Mankiw, 2003).

Gambar 2.1. Pengeluaran Pemerintah Pada *Keynesian Cross*



Pada gambar 2.1 dapat dilihat peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output. Peningkatan besarnya pengeluaran pemerintah berhasil merubah keseimbangan dari titik A ke titik B yang berarti peningkatan pertumbuhan (Y).

Dalam Mangkoesobroto (2001) perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa faktor dibawah ini yaitu:

- Perubahan permintaan akan barang publik.
- Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
- Perubahan kualitas barang publik.
- Perubahan harga faktor produksi

Menurut Suparmoko (2002), pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan.

2.2.Konsep Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan esensial dan pemenuhannya merupakan hak asasi yang mendasar bagi manusia. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang secara tegas menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga dalam pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia. Ketersediaan pangan menurut UU no 18 tahun 2012 adalah Kondisi Tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor, apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Definisi ketahanan pangan menurut PP No 68 Tahun 2002 ketahanan pangan pada tingkat nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, baik secara kualitas maupun kuantitas yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Sementara itu, ketahanan pangan secara mikro dapat diartikan terpenuhinya kebutuhan pangan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif. Beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok yaitu ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan tersebut.

Ukuran ketahanan pangan dari sisi swasembada (kemandirian) dapat dilihat dari ketergantungan ketersediaan pangan nasional pada produksi pangan dalam negeri. Dalam operasionalnya, konsep swasembada (kemandirian) sebagai kondisi dimana kebutuhan pangan nasional minimal 90 persen dipenuhi dari produksi dalam negeri (Suryana, 2004). Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, namun jika akses individu

untuk memenuhi kebutuhannya tidak merata maka ketahanan pangan masih rapuh. Diantara berbagai program pengentasan kemiskinan untuk anak-anak miskin dan hampir miskin di USA, kerawanan pangan merupakan salah satu yang cepat bisa diukur oleh adanya perubahan kebijakan (Cook & Frank, 2008).

Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia sehingga pangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau, dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu (Rachman & Ariani, 2002). Dalam pengertian kebijakan operasional pembangunan, Departemen Pertanian menterjemahkan ketahanan pangan menyangkut ketersediaan, aksesibilitas (keterjangkauan), dan stabilitas pengadaannya. Disamping aspek produksi, ketahanan pangan mensyaratkan pendapatan yang cukup bagi masyarakat untuk mengakses bahan pangan, keamanan pangan, serta aspek distribusi. Sawit (1997) mengemukakan bahwa penentu utama ketahanan pangan di tingkat nasional, regional, dan lokal dapat dilihat dari tingkat produksi, permintaan, persediaan dan perdagangan pangan.

Indikator ketahanan pangan juga dapat dilihat dari pangsa pengeluaran. Working (1943) yang dikutip oleh Pakpahan et-al., (1993) menyatakan bahwa pangsa pengeluaran pangan mempunyai hubungan negatif dengan pengeluaran rumah tangga, sedangkan ketahanan pangan mempunyai hubungan yang negatif dengan pangsa pengeluaran pangan. Hal ini berarti semakin besar pangsa pengeluaran pangan suatu rumah tangga semakin rendah ketahanan pangannya.

Ketahanan pangan dalam arti keterjangkauan pangan juga berkaitan erat dengan upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia. Tanpa dukungan pangan yang cukup dan bermutu, tidak mungkin dihasilkan sumberdaya manusia yang bermutu. Oleh karena itu membangun sistem ketahanan pangan yang kokoh merupakan syarat mutlak bagi pembangunan nasional. Persoalan ketahanan pangan bukan sekedar terpenuhinya aspek ketersediaan pangan bagi masyarakat, tetapi juga yang jauh lebih penting adalah aspek aksesibilitas (keterjangkauan) masyarakat (rumah tangga) terhadap bahan pangan. Daya beli rumah tangga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keterjangkauan pangan. Sementara itu, daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan harga komoditas pangan (Rosyadi dan Didit, 2012).

Elemen yang digunakan pada strategi pendekatan ketahanan pangan di negara-negara Asia berupa kecepatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga pangan merupakan dimensi

makro dari ketahanan pangan, bukan dimensi mikro sebagaimana ditemui di rumah tangga. Namun, pemerintah dapat melakukan banyak hal guna peningkatan ketahanan pangan untuk tingkat individu atau rumah tangga, dan hampir semua negara di Asia memiliki program yang berkaitan dengan ketahanan pangan (Timmer, 2004b).

2.3. Infrastuktur

Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi - instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem berekonomi masyarakat (Prasetyo, 2008).

American Society of Civil Engineers (ASCE) menganggap definisi yang lebih komprehensif infrastruktur ada pada laporan tahunan "Daftar Laporan Infastruktur Amerika". Daftar ini memuat data infrastruktur untuk penerbangan, jembatan, bendungan, air minum, energi, tempat limbah berbahaya, jalur air bernavigasi, taman umum dan rekreasi, kereta api, jalan, sekolah, keamanan, limbah padat, jalur transit dan jalur air limbah. Sekali lagi, bagaimanapun, daftar laporan tidak menjelaskan mengapa sarana sarana itu dikelompokkan dalam kategori infrastruktur (Baldwin dan Dixon, 2008).

Karakteristik infrastruktur adalah: (1) Aset memiliki bentuk fisik dengan masa pakai yang panjang. Penciptaan aset memerlukan cukup periode persiapan pembangunannya; (2) Aset memiliki sedikit pengganti dalam jangka pendek; (3) Struktur aset mampu memperlancar aliran barang dan jasa dan tanpa asset akan terjadi gangguan dalam aliran persediaan barang dan jasa; (4) Aset penting terutama karena asset berfungsi sebagai barang komplementer atau pelengkap terhadap barang dan jasa dalam faktor produksi; dan (5) Memiliki eksternalitas positif yaitu daya manfaatnya dapat dinikmati pihak diluar pembuat infratruktur tersebut (Baldwin dan Dixon,2008).

Bank Dunia (Wahyuni, 2009) mendefinisikan infrastruktur ekonomi, merupakan aset fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi baik dalam produksi maupun konsumsi final, meliputi public utilities (tenaga, telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), public work (jalan, bendungan, kanal, saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi (jalan, rel kereta api, angkutan pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).

Bank Dunia (Wahyuni, 2009) membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu: (1) Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities (tenaga listrik, telekomunikasi, air, sanitasi, gas),

public work (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang); (2) Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi; (3) Infrastruktur administrasi, meliputi penegak hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.

2.4. Teori dan Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah persoalan multidimensional yang dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai kalangan. Ragam perspektif yang tersedia dalam menelaah kemiskinan, seperti sosio-kultural, ekonomi, politik atau pun psikologi, memungkinkan setiap orang untuk melakukan penafsiran berdasarkan kepentingan mereka. Sebagai contoh, pendekatan sosio-kultural, seringkali melihat kemiskinan sebagai sesuatu yang lahir dari budaya buruk masyarakat di negara berkembang, seperti malas, apatis, kurang motivasi dan kurang jiwa kewirausahaan (entrepreneurship). Banyak pandangan dan pendapat serta ukuran kemiskinan akan membentuk satu lingkaran kemiskinan yang selalu berkaitan dan tidak akan terputus.

Menurut Sawitri (2007) ada bermacam-macam indikator kemiskinan yang digunakan di Indonesia, seperti konsumsi beras per kapita per tahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, kebutuhan fisik minimum, dan tingkat kesejahteraan. *World Bank* penyebab kemiskinan setidaknya ada tiga dimensi yang ada pada orang miskin, yaitu: (i) Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti: makanan, tempat tinggal, pakaian, serta kesehatan dan pendidikan yang layak; (ii) Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di dalam institusi negara dan masyarakat; (iii) Rentan terhadap guncangan ekonomi karena ketidakmampuan menanggulangnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan antara lain yaitu: a) Mata pencaharian utama di sektor pertanian, b) Adanya perekonomian dualistis, c) Kurangnya pengolahan sumber daya alam secara efisien, d) Pertumbuhan penduduk yang cepat, e) Tingginya angka pengangguran, f) Kondisi ekonomi yang terbelakang, g) Tidak adanya inisiatif untuk berusaha, h) Adanya kelangkaan alat modal, i) Rendahnya tingkat penguasaan teknologi, j) Orientasi ekspor barang primer.

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) dari Nurske 1953. Lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi suatu keadaan negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketertinggalan SDM (tercermin oleh rendahnya IPM), ketidak sempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas..

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000) sebagai berikut: (1) Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah; (2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah; (3) Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sharp et.al. dalam Kuncoro (2000) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat, yang terbagi dalam tiga perspektif. Pertama, kemiskinan terjadi karena adanya perbedaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya sangat terbatas dengan kualitas rendah. Kedua, kemiskinan muncul sebagai akibat adanya perbedaan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah akan mengakibatkan rendahnya produktivitas sehingga akan mengakibatkan rendahnya tingkat upah yang diterima. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia disebabkan antara lain oleh rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi dan faktor keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan akses dalam modal.

2.5. Pendapatan Perkapita

Pendapatan adalah suatu aliran penerimaan yang dapat dikonsumsi tanpa mengurangi jumlah atau nilai sumber yang menciptakan aliran penerimaan tersebut. Pendapatan perkapita menurut Sukirno (2004) adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara pada satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk negara pada tahun tersebut. Untuk mengukur kondisi seseorang atau rumah tangga, salah satu pokok paling sering digunakan yaitu melalui tingkat pendapatannya. Pendapatan menunjukkan seluruh uang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

Fungsi pendapatan perkapita dalam analisis pembangunan ekonomi adalah menggambarkan jurang tingkat kemakmuran diberbagai negara. Dalam konteks ini diasumsikan tingkat kemakmuran suatu negara direfleksikan oleh pendapatan rata-rata yang diterima penduduknya (Sukirno, 2005). Semakin tinggi pendapatan tersebut semakin tinggi daya beli penduduk, dan daya beli bertambah ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI SUMATERA SELATAN

3.1. Pengeluaran Bidang Infrastruktur

Menurut Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (2015), Infrastruktur Pekerjaan Umum berperan vital dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional terutama sebagai katalisator di antara proses produksi, pasar dan konsumen akhir yang keberadaannya dapat merefleksikan kemampuan memproduksi masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta merupakan modal sosial bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Ketersediaan infrastruktur Pekerjaan Umum yang merupakan bangunan fisik untuk kepentingan umum seperti jalan dan jembatan merupakan prasyarat agar berputarnya roda ekonomi dengan baik. Agar infrastruktur PU dapat berfungsi sesuai peran pentingnya tersebut, berbagai upaya sedang dilakukan pemerintah untuk dapat menyediakan infrastruktur PU yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan dalam mendukung ekonomi agar terwujudnya Indonesia yang lebih sejahtera.

Upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur digambarkan dengan pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 dengan tema pembangunan “Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis” yang mana tema tersebut sudah sejalan dengan tema rencana kerja pemerintah, yaitu memperkuat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkualitas. Upaya-upaya untuk memenuhi tema yang telah ditetapkan adalah dengan menguraikannya menjadi prioritas pembangunan daerah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan. Karena itu kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 sesuai tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan pembangunan infrastruktur strategis terutama pembangunan jalan dan jembatan.

Sejalan dengan pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional dalam memenuhi Program Nawacita Presiden Republik Indonesia yang salah satunya menekankan pada percepatan pembangunan infrastruktur yang menjangkau pemerataan infrastruktur antar wilayah terutama pembangunan dari daerah terpencil dan perbatasan, menunjukkan adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat yang telah

dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016.

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Selatan, Pengeluaran Pemerintah di bidang infrastruktur diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Selatan. Total pengeluaran pemerintah pada bidang infrastruktur di Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.1. Berdasarkan Tabel 3.1, anggaran infrastruktur di Sumatera Selatan cenderung mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 31,4% dari tahun 2010. Tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 16,4%, tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 26,6%, tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 19,8%, namun pada tahun 2015 sempat mengalami penurunan anggaran infrastruktur sebesar 8,4% dari tahun 2014, dan pada tahun 2016 anggaran infrastruktur mengalami peningkatan kembali sebesar 16,6% dari tahun sebelumnya.

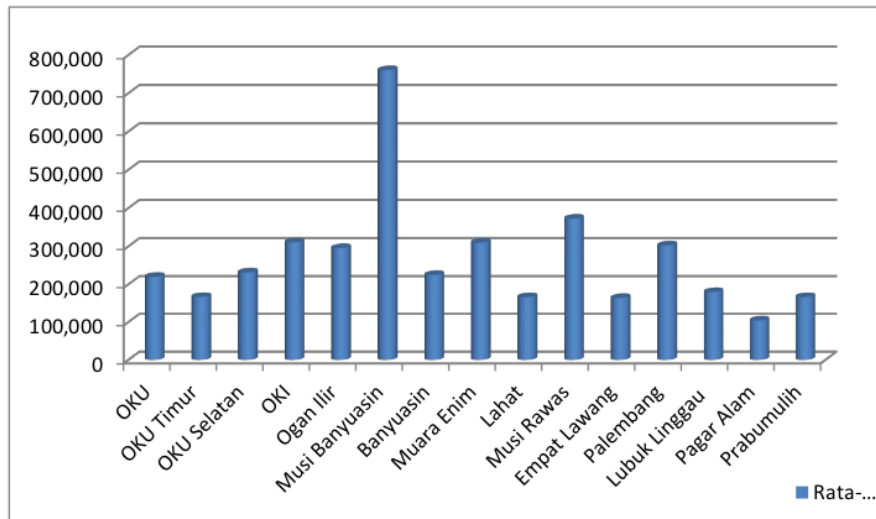
Tabel 3.1.
Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan
(Juta Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Ogan Komering Ulu	152.209	159.097	198.122	273.303	269.298	217.358	269.524
2	OKU Timur	76.133	121.095	128.658	195.781	199.770	219.884	224.282
3	OKU Selatan	72.620	217.828	178.369	224.766	256.912	306.001	364.141
4	Ogan Komering Ilir	134.204	305.675	308.238	368.886	348.114	352.661	356.188
5	Ogan Ilir	219.942	189.004	272.997	338.689	402.243	295.737	348.970
6	Musi Banyuasin	323.815	634.365	695.240	800.360	1.007.589	845.268	1.014.322
7	Banyuasin	145.533	149.144	154.450	228.181	307.327	251.446	336.938
8	Muara Enim	203.343	215.202	199.530	330.966	448.568	375.959	394.757
9	Lahat	109.267	133.989	138.137	147.748	107.048	189.974	336.254
10	Musi Rawas	270.634	237.432	414.242	490.251	392.968	398.031	402.011
11	Empat Lawang	64.165	80.203	149.976	208.132	199.977	214.140	229.130
12	Palembang	170.278	178.630	145.176	288.699	498.318	409.051	425.413
13	Lubuk Linggau	99.858	121.160	153.789	110.262	301.996	212.580	257.222
14	Pagar Alam	31.677	38.624	90.210	85.864	133.329	137.498	213.122
15	Prabumulih	115.562	95.485	122.659	147.395	203.819	227.166	252.154
	Sumatera Selatan	2.189.240	2.876.933	3.349.793	4.239.283	5.077.276	4.652.754	5.424.427

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017

Gambar 3.1. Rata-rata Pengeluaran Infrastruktur di Sumatera Selatan

(Juta Rupiah)



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017.

Anggaran infrastruktur di Sumatera Selatan tahun 2016 memiliki anggaran yang paling besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, mengingat anggaran pemerintah dialokasikan pada pembangunan infrastruktur, sehingga proporsi anggaran di tahun 2016 lebih besar. Alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan dan jembatan tersebut merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang mengalihkan alokasi subsidi BBM ke anggaran infrastruktur. Pada gambar 4.6 menunjukkan rata-rata pengeluaran infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan. Dari lima belas Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan alokasi anggaran infrastruktur terbesar adalah Kabupaten Musi Banyuasin dengan rata-rata sebesar 760,13 milyar rupiah dan diikuti Musi Rawas dengan rata-rata 372,2 milyar rupiah, dengan perkembangan anggaran yang berfluktuatif di kabupaten/kota Sumatera Selatan. Hal ini karena adanya keterbatasan anggaran pemerintah sehingga alokasi anggaran pada pembangunan skala prioritas nasional, provinsi dan kabupaten, terlebih wilayah dengan kondisi jalan dan jembatan dengan tingkat kerusakan yang lebih tinggi akan dialokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang lebih besar. Selanjutnya, OKI, Muara Enim dan Kota Palembang juga memiliki anggaran yang besar setelah Musi Banyuasin dan Palembang dengan rata-rata pengeluaran infrastruktur masing-masing sebesar 310,5 milyar, 309,7 milyar dan 302.2 milyar rupiah. Tetapi anggaran infrastruktur yang paling sedikit

diantara lima belas Kabupaten/Kota yaitu Pagar Alam dengan rata-rata pengeluaran infrastruktur sebesar 104,3 milyar dan Empat Lawang dengan rata-rata 163,6 milyar rupiah .

Alokasi anggaran untuk Kabupaten Musi Banyuasin lebih besar setiap tahunnya karena merupakan salah satu wilayah dengan pembangunan prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, mengingat Kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas wilayah yang lebih besar dibandingkan Kota Palembang dengan kondisi jalan dan jembatan yang masih banyak rusak, hal ini sejalan dengan kapasitas jalan meningkat pesat dan angkutan transportasi meningkat sehingga tonase harian rata-rata melebihi ambang batas, para pengguna jalan yang menggunakan alat angkut bertonase tinggi melewati jalan mengakibatkan jalan rusak. Kerusakan jalan mengakibatkan terjadinya peningkatan waktu tempuh dalam distribusi barang dan mobilitas manusia sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi. Maka, diperlukan perbaikan jalan dengan anggaran pemerintah yang cukup besar.

Kota Palembang sendiri juga memiliki anggaran infrastruktur terbesar mencapai 425,4 milyar rupiah, pembangunan prioritas Kota Palembang seperti adanya pembangunan jembatan baru Musi Enam untuk prioritas penanggulangan kemacetan Kota Palembang dan Infrastruktur lainnya pendukung terselenggaranya Sea Games 2018. Adanya pembangunan jalan dan jembatan baru ini membutuhkan dana yang lebih besar. Sehingga, Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur yang lebih besar.

Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga diimplementasikan melalui program infrastruktur jalan dan jembatan. Pemerintah Indonesia telah merumuskan pembangunan ekonomi Indonesia yang secara prinsip memuat *triple track strategy*, yaitu *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-poor*. Sejalan dengan prinsip tersebut, maka peran pembangunan infrastruktur dalam pembangunan nasional pada dasarnya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum (2015) pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan formula handal dalam percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Infrastruktur jalan dan jembatan dapat membuka akses terhadap kesempatan kerja, pelayanan, investasi, serta dapat menjadi pendorong perputaran atau siklus kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan ekonomi lokal.

Beberapa program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Berdasarkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2017) menunjukkan persentase anggaran bidang infrastruktur jalan dan jembatan selama tujuh tahun yang mengalami perkembangan. Anggaran pada program pembangunan jalan dan jembatan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2015 sempat mengalami penurunan hingga

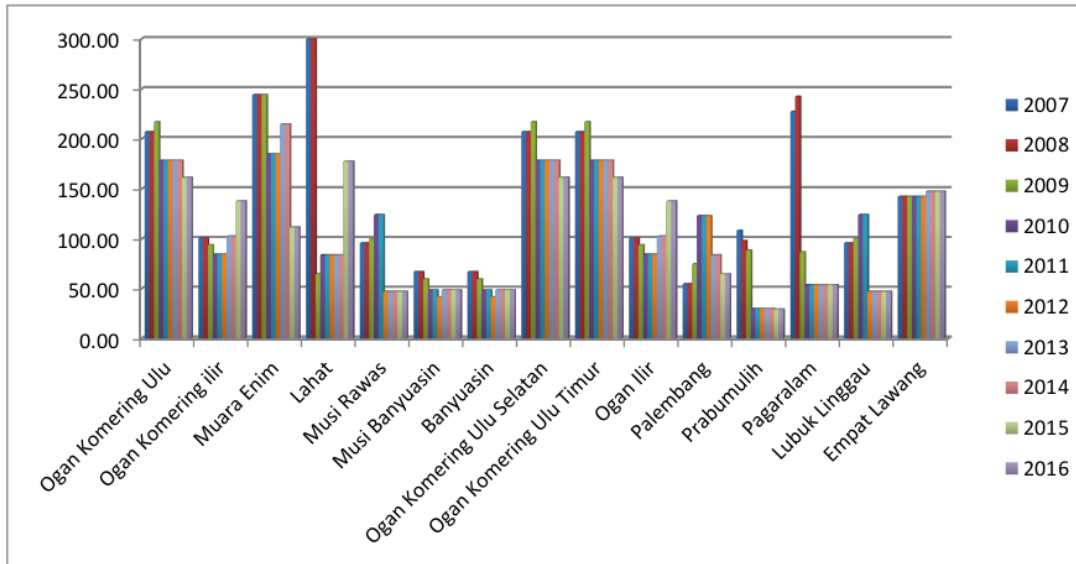
4,9% dari tahun sebelumnya. Hal ini karena sejalan dengan penurunan alokasi anggaran infrastruktur di tahun 2015.

Proporsi anggaran program pembangunan jalan dan jembatan terbesar terjadi pada tahun 2016. Pada tahun 2010 sampai dengan 2014 program pembangunan jalan dan jembatan di prioritaskan pada kegiatan peningkatan dan pembangunan jalan seperti, peningkatan jalan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, peningkatan jalan Muara Siban Kabupaten Lahat, dan pembangunan jalan akses bandar udara Kebun Sayur Kota Palembang yang memiliki proporsi anggaran terbesar untuk pembangunan jalan pada tahun tersebut, sedangkan di tahun 2014 dan 2015 prioritas pada kegiatan pembangunan jembatan di beberapa Kabupaten/Kota seperti, pembangunan jembatan Musi Enam Kota Palembang, jembatan Air Komerling Kabupaten OKU Timur, dan jembatan Air Kelingi di Lubuk Linggau. Program-program tersebut diharapkan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan dari program infrastruktur jalan dan jembatan tersebut, terutama dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin yang masih tinggi di beberapa Kabupaten/Kota.

3.2. Infrastruktur Jalan

Jalan merupakan infrastruktur yang penting untuk menghubungkan satu daerah ke daerah lain atau satu pusat perekonomian ke pusat perekonomian lainnya. Infrastruktur jalan menjadi unsur sentral dalam pengembangan wilayah serta peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai akan menjadi distribusi barang dan jasa menjadi lebih cepat dan efisien dalam hal biaya dan waktu, sehingga memudahkan para investor dalam berusaha. Semakin panjang dan baik kualitas sebuah jalan, maka akan memperlancar distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya menarik investasi dan meningkatkan pendapatan perkapita suatu daerah.

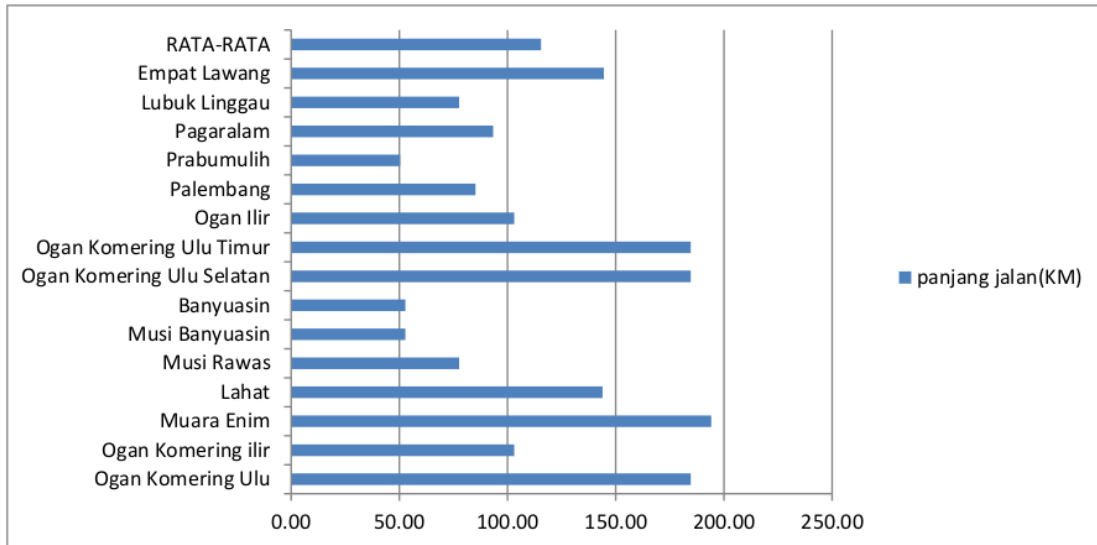
Gambar 3.2. : Panjang Jalan di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum (Bina Warga) Provinsi Sumatera Selatan

Panjang jalan yang tersedia di masing-masing kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan masih belum merata. Dilihat pada gambar 11 menunjukkan bahwa lebih dari setengah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan memiliki panjang jalan di bawah rata-rata. Jika dilihat dari kewenangan pemerintah yang mengelolanya, jalan terpanjang dimiliki oleh kabupaten Muara Enim dengan rata-rata panjang jalan tahun 2007-2016 sebesar 194,13 km. Disusul oleh kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Komering Ulu Timur yang masing-masing memiliki rata-rata panjang jalan sebesar 184,67 km. Untuk kota Palembang sendiri memiliki panjang jalan dibawah rata-rata sebesar 85,18 km. Sedangkan panjang jalan terendah ditempati oleh kota Prabumulih sebesar 50,35 km. Pada kabupaten Prabumulih ini juga terjadi kerusakan jalan secara merata yang menghubungkan kota-kota di Sumatera Selatan.

Gambar 3.3. : Rata-Rata Panjang Jalan di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum (Bina Warga) Provinsi Sumatera Selatan (diolah)

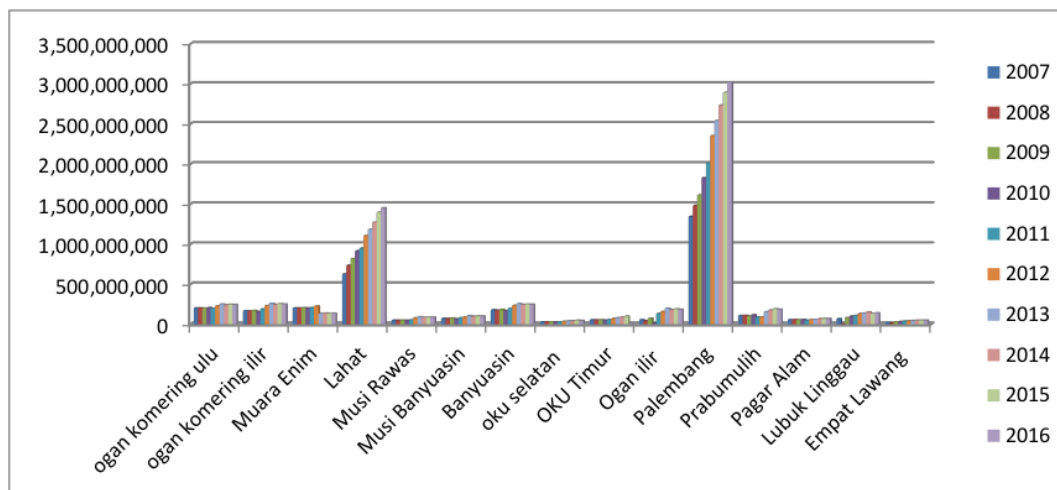
Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Sumatera Selatan belum merata pada tiap kabupaten/kota. Sehingga dapat mempengaruhi aktivitas dan produktivitas ekonomi antar kabupaten/kota. Panjang jalan yang belum merata antar daerah di Sumatera Selatan dan kerusakan jalan ini yang pada akhirnya dapat menyebabkan terganggunya aktivitas perekonomian.

3.3. Infrastruktur Listrik

PT PLN merupakan perusahaan yang memenuhi sebagian besar kebutuhan listrik di Indonesia. Energi Listrik adalah salah satu sumber vital yang diperlukan sebagai sarana pendukung produksi atau kehidupan sehari-hari, dan memegang peranan penting dalam upaya mendukung pembangunan nasional secara luas baik ekonomi, sosial maupun budaya

Semakin majunya suatu wilayah, kebutuhan akan listrik telah menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi, tidak hanya dikonsumsi untuk kebutuhan rumah tangga namun juga untuk kegiatan ekonomi terutama sektor industri. Dalam aktivitas-aktivitas masyarakat pada saat ini mengandalkan sumber energi dan listrik yang memadai. Oleh karena itu permintaan listrik meningkat dari tahun ke tahun baik dari segi kuantitasnya maupun kualitasnya.

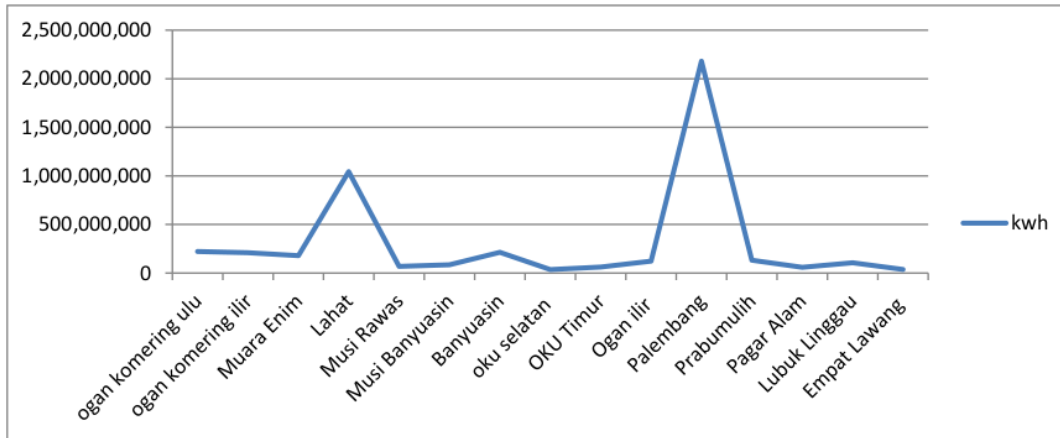
Gambar 3.4. Jumlah Konsumsi Listrik di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: **PT. PLN WS2JB; BPS Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka

Dapat dilihat pada gambar 3.4, terlihat bahwa konsumsi listrik kabupaten/kota Sumatera Selatan dari tahun 2007-2016 relatif cenderung mengalami peningkatan akan konsumsi listrik setiap tahunnya. Kota Palembang merupakan daerah yang memiliki konsumsi listrik tertinggi di Sumatera Selatan dan selalu menunjukkan peningkatan konsumsi akan listrik yang cukup tinggi setiap tahunnya dengan rata-rata jumlah konsumsi listrik sebesar 2.180.913.182 Kwh dalam sepuluh tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena kota Palembang merupakan pusat perekonomian dan pembangunan di Sumatera Selatan dengan kontribusi sektor industri yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi akan tingginya konsumsi listrik di kota Palembang. Tingginya penggunaan listrik di kota Palembang dimanfaatkan untuk industri dan rumah tangga dengan populasi penduduk kota Palembang paling besar dan kegiatan ekonominya yang telah maju. Disusul oleh Kabupaten Lahat menempati konsumsi listrik yang tinggi sebesar 1.044.355.450 Kwh. Sedangkan daerah yang memiliki jumlah rata-rata konsumsi listrik terendah terdapat di kabupaten Empat Lawang, mengingat kabupaten Empat Lawang yang masih rendahnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta merupakan daerah baru pemekaran dengan populasi penduduk yang rendah.

Gambar 3.5. Rata-Rata Jumlah Konsumsi Listrik di Provinsi Sumatera Selatan



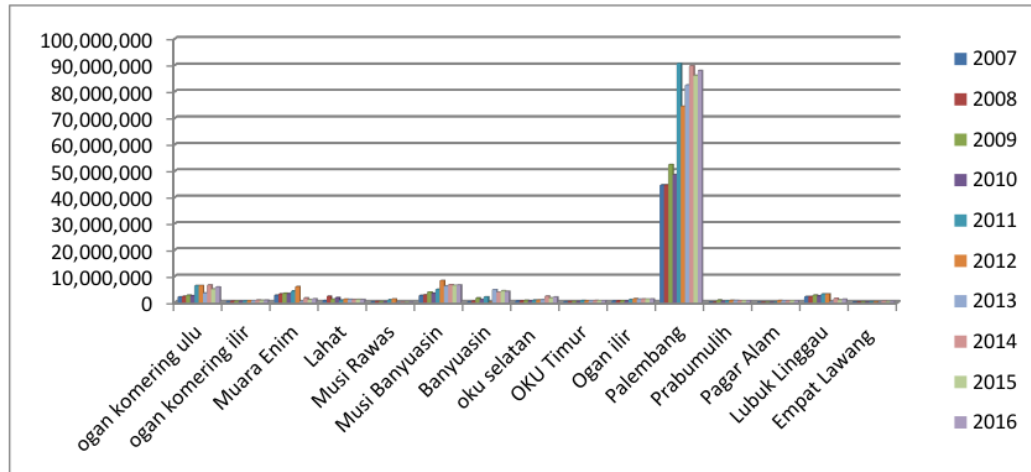
*Sumber: **PT. PLN WS2JB; BPS Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka(diolah)*

Secara keseluruhan, rata-rata jumlah konsumsi listrik di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan masih belum merata diantara kabupaten/kota dilihat pada gambar 13 masih besarnya ketimpangan konsumsi listrik antar kabupaten.kota di sepuluh tahun terakhir yaitu tahun 2007-2016. Pentingnya ketersediaan infrastruktur kelistrikan ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi wilayah. Perekonomian wilayah yang mampu berkembang dengan baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.4. Infrastruktur Air Bersih

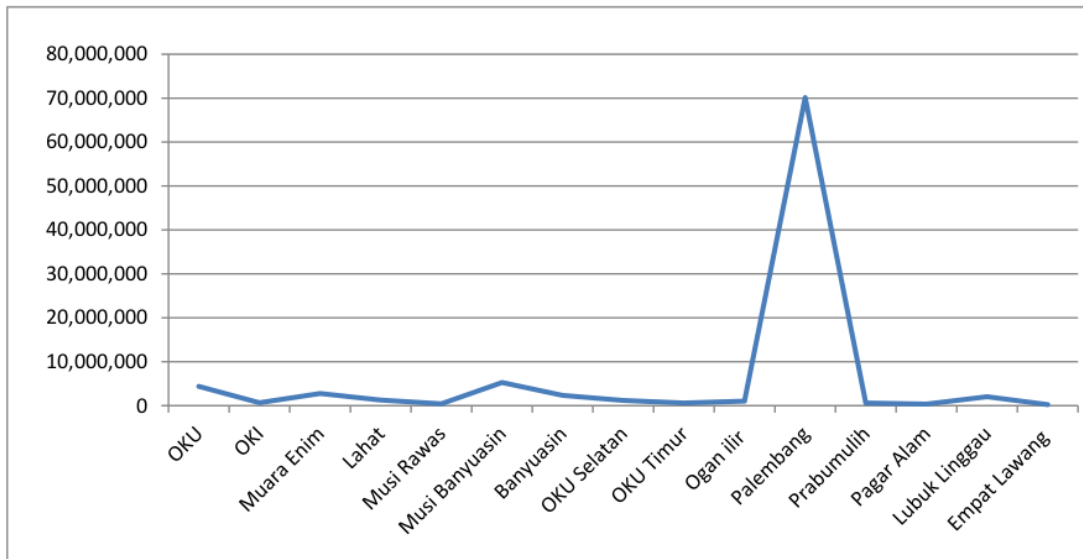
Ketersediaan air bersih merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam suatu perekonomian. Air bersih merupakan barang ekonomi karena dalam penggunaannya membutuhkan kompetisi. Dalam kehidupan sehari-hari, air bersih mempunyai peran untuk menunjang kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat yang dapat mempengaruhi produktivitas masyarakat dan output perekonomian suatu wilayah.

Gambar 3.6. Jumlah Volume Air Bersih di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka

Gambar 3.7. Rata-Rata Jumlah Volume Air Bersih di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka (diolah)

Pada gambar 3.7 menunjukkan jumlah volume air bersih yang disalurkan ke kabupaten/kota Sumatera selatan masih belum merata di setiap kabupaten kota. Terlihat dari grafik yang menggambarkan besarnya perbedaan volume air yang disalurkan pada setiap kabupaten/kota. Daerah yang memiliki jumlah volume air bersih tertinggi terdapat di kota

Palembang dengan rata-rata jumlah volume air yang disalurkan pada tahun 2007-2016 sebesar 70.138549 m³. Jika dibandingkan dengan kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki volume air bersih tertinggi kedua dengan rata-rata volume air bersih sebesar 5.249.889 m³, maka dapat dilihat ketimpangan yang sangat besar diantara kedua daerah ini, hal ini menunjukkan tingginya ketidakmerataan distribusi air bersih yang disalurkan pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan daerah dengan volume air bersih terendah adalah kabupaten Empat Lawang dengan rata-rata volume air sebesar 228.882 m³. Hal ini terjadi karena penggunaan air bersih terbesar terjadi di ibukota provinsi yaitu kota Palembang dengan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi.

BAB IV
KETAHANAN PANGAN DI SUMATERA SELATAN

4.1. Produksi Tanaman Pangan

Padi merupakan salah satu komoditas pangan yang paling dominan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dimana padi merupakan bahan makanan yang mudah diubah menjadi energi, di samping mengandung gizi dan penguat yang cukup bagi tubuh. Untuk menuju kecukupan pangan yang berasal dari beras/padi, pemerintah baik sejak masa kolonial Belanda maupun setelah kemerdekaan dan hingga saat ini, menerapkan berbagai kebijakan seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Potensi Ketahanan Pangan Produksi Padi

Sumatera Selatan memiliki 11 Kabupaten dan 4 Kota yang potensial dalam menghasilkan pangan. Salah tanaman pangan yang sangat penting dan sumber energi bagi masyarakat ialah tanaman padi. Tanaman padi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ada dua jenis yaitu padi sawah dan padi ladang. Setiap tahunnya produksi kedua jenis padi ini berbeda-beda untuk masing-masing kabupaten/kota.

Demikian provinsi Sumatera Selatan dengan kabupaten/kota memiliki produksi padi dengan kuantitas yang beragam seperti tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Produksi Tanaman Padi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan (Ton)

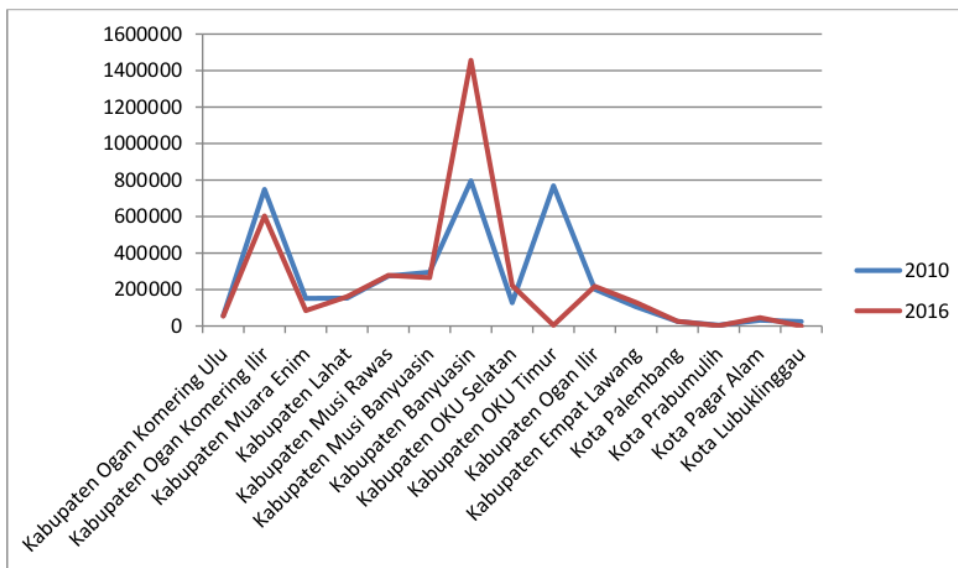
No.	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Ogan Komering Ulu	56621.51	68872.5	89505.35	87747.98	71241.91	69488	54624.81
2	Ogan Komering Ilir	748815	572915	1116970	1059668	1125760	624017	603075.7
3	Muara Enim	151755	133643.8	127701.3	120340.8	93864.34	77629.43	84486.35
4	Lahat	153253.78	157608.5	124500	153555	150850	159669	161404.7
5	Musi Rawas	274325	280331	144232	203628	250504	276918	277569.3
6	Musi Banyuasin	294693.488	265573	224654	260148	239665	249851	265026.9
7	Banyuasin	795550.8	820337.7	882548.8	943104	915442	1236750	1455995
8	OKU Selatan	127841	84283	125421	162691.1	174595	202658	222300.7
9	OKU Timur	768288.8	896377.7	708263.3	730147	717651.9	864437	4862
10	Ogan Ilir	201267	200112	173057	226937	216624	175929	217875
11	Empat Lawang	105273	124463	123907	115430	140526	123746	128973.8
12	Palembang	25052	20538	28828.7	29628.72	19099	25912	26087.51
13	Prabumulih	4937.18	1131237	980	925.04	2825.5	1623	1569.20
14	Pagar Alam	31816.91	50323.08	29299	33474.04	48259.22	43040	45720.94
15	Kota Lubuklinggau	24186.89	25539.6	14965.27	22444.46	0	25208	0

Sumber : BPS, 2017

Beberapa hal yang terus menjadi perhatian dalam meningkatkan produksi adalah meningkatkan produktivitas melalui berbagai teknologi baru mulai dari penyediaan benih, pengolahan lahan hingga pascapanen, juga menambah luas tanam dan luas panen melalui peningkatan indeks pertanaman padi.

Gambar 4.1 menunjukkan jumlah produksi tanaman padi tahun 2010 dan 2016 Kabupaten/Kota Sumatera Selatan, dari gambar tersebut dapat terlihat terjadinya kenaikan dan penurunan yang cukup menonjol di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2010 Kabupaten OKU Timur merupakan Kabupaten yang memiliki jumlah produksi tanaman padi sawah maupun ladang yang paling banyak sedangkan Kota Prabumulih merupakan Kota yang memiliki jumlah produksi tanaman padi paling sedikit. Pada tahun 2016 Kabupaten Banyuasin merupakan Kabupaten yang memproduksi jumlah tanaman padi paling tinggi dan Kota Lubuklinggau tidak memproduksi tanaman padi. Dari gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah produksi tanaman padi Kabupaten/Kota rata-rata mengalami kenaikan dan penurunan hal itu bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tanaman padi itu sendiri.

Gambar 4.1. Jumlah Produksi Padi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Selain produksi padi, ada beberapa gambaran mengenai produksi tanaman pangan non padi. Perkembangan produksi dapat dilihat pada Tabel 4.2.berikut ini. Pada tabel di bawah ini

menunjukkan bahwa perkembangan masing jenis tanaman pangan bukan padi seperti ketela pohon, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan jagung, jika dilihat dari pengamatan periode 1990-2014 pertumbuhan masing-masing cukup bervariasi dan fluktuatif. Pertumbuhan produksi masing-masing tanaman pangan bukan padi seperti ketela pohon rata-rata tumbuh sebesar 0,53 persen, ubi jalar rata-rata tumbuh sebesar 0.99 persen, kemudian kacang tanah rata-rata tumbuh 2,13 persen, selanjutnya jagung tumbuh dengan rata-rata sebesar 9,70 persen, sedangkan yang rata-rata tumbuh lebih besar dari tanaman lainnya.

Namun, jika dilihat dari sisi produksi, justru ketela pohon memproduksi cukup besar dibandingkan tanaman lainnya, selain itu, tanaman jagung, ubi jalar, kacang tanah, dan terakhir kedelai. Tanaman tersebut merupakan tanaman pangan pengganti padi yang mempunyai kandungan karbohidrat. Selain itu, tanaman pangan bukan padi, dapat ditanami di lahan yang sama, dapat menjadi tanaman tumpang sari, dan tanaman di sela-sela musim sehabis panen padi. Hal ini sangat diharapkan karena akan memberikan manfaat dan nilai tambah bagi petani padi di saat lahan tidak terpakai secara optimal.

Tabel 4.2.
Produksi Palawija (Tanaman Pangan non Padi) (dalam Kwintal) Sumatera Selatan

Tahun	Produksi Tanaman bukan Padi (Kwintal)									
	Ketela Pohon	G (%)	Ubi Jalar	G (%)	Kacang Tanah	G (%)	Kedelai	G (%)	Jagung	G (%)
2000	292.663	-30,80	20.565	-43,16	7.082	-48,52	8.732	-58,04	92.877	-19,95
2001	323.675	10,60	14.804	-28,01	6.167	-12,92	5.337	-38,88	68.769	-25,96
2002	271.049	-16,26	16.878	14,01	6.218	0,83	3.788	-29,02	53.436	-22,30
2003	158.042	-41,69	20.272	20,11	7.681	23,53	4.815	27,11	59.261	10,90
2004	248.844	57,45	22.573	11,35	7.188	-6,42	4.664	-3,14	65.234	10,08
2005	179.952	-27,68	24.465	8,38	9.756	35,73	5.160	10,63	75.566	15,84
2006	228.321	26,88	20.747	-15,20	11.696	19,89	3.788	-26,59	73.896	-2,21
2007	150.133	-34,24	21.515	3,70	7.676	-34,37	2.873	-24,16	84.081	13,78
2008	197.150	31,32	19.621	-8,80	7.499	-2,31	7.305	154,26	101.439	20,64
2009	166.890	-15,35	20.800	6,01	6.459	-13,87	13.702	87,57	113.167	11,56
2010	159.929	-4,17	22.839	9,80	6.109	-5,42	11.664	-14,87	125.796	11,16
2011	159.346	-0,36	18.309	-19,83	3.960	-35,18	13.710	17,54	125.688	-0,09
2012	140.565	-11,79	17.380	-5,07	4.060	2,53	12.162	-11,29	112.917	-10,16
2013	165.250	17,56	15.945	-8,26	3.476	-14,38	5.140	-57,74	167.457	48,30
2014	220.014	33,14	24.454	53,36	2.721	-21,72	12.550	144,16	191.974	14,64
Rerata	204.121	-0,36	20.077	-0,11	6.51	-7,51	7.692	11,84	100.770	5,08

Sumber: BPS, data diolah, 2018

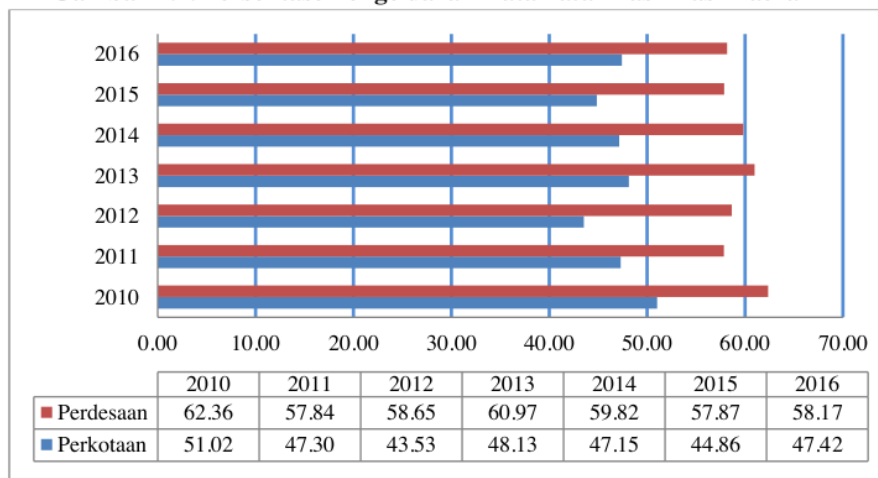
Keterangan: G = Pertumbuhan (dalam %)

4.2. Pengeluaran Konsumsi Makanan

Salah satu determinan dari kesejahteraan ekonomi penduduk adalah kemampuan daya beli penduduk. Peningkatan kemampuan daya beli akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok. Meningkatnya kemampuan daya beli penduduk tentu saja diakibatkan meningkatnya pendapatan. Karena itu besarnya konsumsi/pengeluaran penduduk merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk.

Alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat secara garis besar dapat digolongkan dalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran makanan dan pengeluaran bukan makanan. Tingkat kebutuhan/permintaan terhadap kedua kelompok tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, kebutuhan makanan lebih didahulukan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri jika dilihat dari klasifikasi daerah, pengeluaran masyarakat di daerah pedesaan banyak dihabiskan untuk keperluan makanan, sedangkan pengeluaran untuk masyarakat perkotaan banyak dihabiskan untuk keperluan non makanan. Berikut besarnya persentase pengeluaran makanan menurut klasifikasi daerah.

Gambar 4.2. Persentase Pengeluaran Rata-rata Klasifikasi Daerah

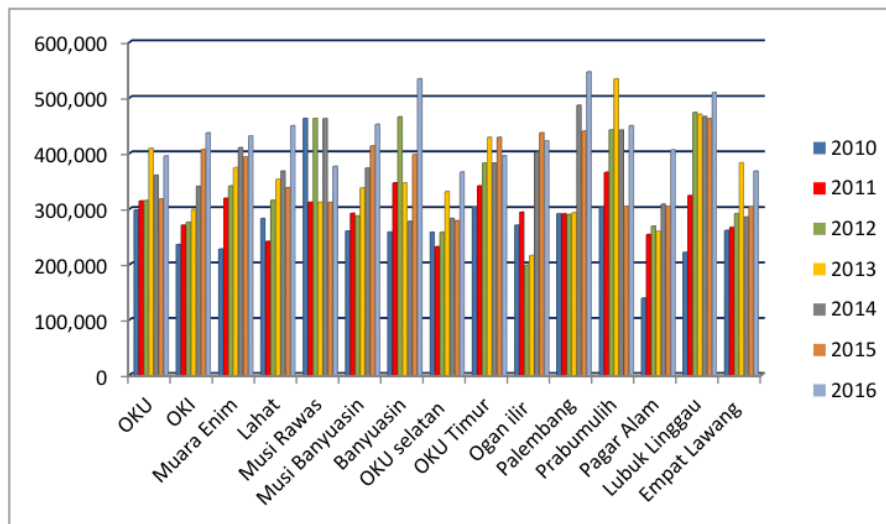


Sumber : Susenas 2010-2016

Pada Gambar 4.2 dapat dilihat dari klasifikasi daerah, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan cenderung mengalami penurunan proporsi pengeluaran makanan. Untuk

daerah perkotaan cenderung mengalami penurunan proporsi pengeluaran makanan pada periode 2010-2012, dari 51,02 pada tahun 2010 menjadi 47,3 persen di tahun 2011 dan menjadi 43,53 persen pada tahun 2012, mengalami kenaikan pada periode 2012-2013 menjadi 48,13 persen, periode 2013-2015 mengalami penurunan menjadi 44,86 persen, tapi pada tahun 2016 mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 47,42 persen. Untuk daerah pedesaan, proporsi pengeluaran makanan pada periode 2010-2011 mengalami penurunan, sebaliknya mengalami kecenderungan peningkatan pada periode 2011-2013, dan kembali mengalami penurunan pada periode 2013-2015, pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Prioritas penduduk pedesaan terhadap konsumsi makanan masih tinggi, di mana pada periode 2010–2016 proporsi konsumsi makanan masih sangat besar di atas 57 persen.

Gambar 4.3. Pengeluaran Konsumsi Makanan di Sumatera Selatan



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Secara Umum total pengeluaran konsumsi makanan di Sumatera Selatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi. Tahun 2011 mengalami peningkatan pengeluaran konsumsi makanan sebesar 9,62 persen dari tahun 2010. Tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 13,50 persen, berikutnya di tahun 2013 sendiri mengalami peningkatan sebesar 5,47 persen, tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 5,66 persen, namun pada tahun 2015 sempat mengalami penurunan sebesar 1,94 persen dari tahun 2014, dan pada tahun 2016 pengeluaran konsumsi makanan mengalami peningkatan kembali yang cukup besar yaitu 18,07 persen dari tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari perkembangan jumlah pengeluaran konsumsi makanan menurut kabupaten/kota di Sumatera Selatan, daerah dengan jumlah pengeluaran konsumsi makanan terbesar dimiliki oleh Lubuklinggau dengan total rata-rata pengeluaran konsumsi makanan tahun 2010-2016 sebesar 417.879 rupiah. Selanjutnya pengeluaran konsumsi tertinggi berikutnya disusul oleh Prabumulih dengan total rata-rata pengeluaran konsumsi makanan sebesar 405.573 rupiah, Musi Rawas dengan rata-rata 385.386 rupiah dan OKU Timur dengan rata-rata 380.171 rupiah. Sedangkan untuk jumlah pengeluaran konsumsi makanan terendah dimiliki oleh Pagar Alam dengan rata-rata pengeluaran konsumsi makanan tahun 2010-2016 sebesar 276.945 rupiah.

BAB V

TINGKAT KEMISKINAN DI SUMATERA SELATAN

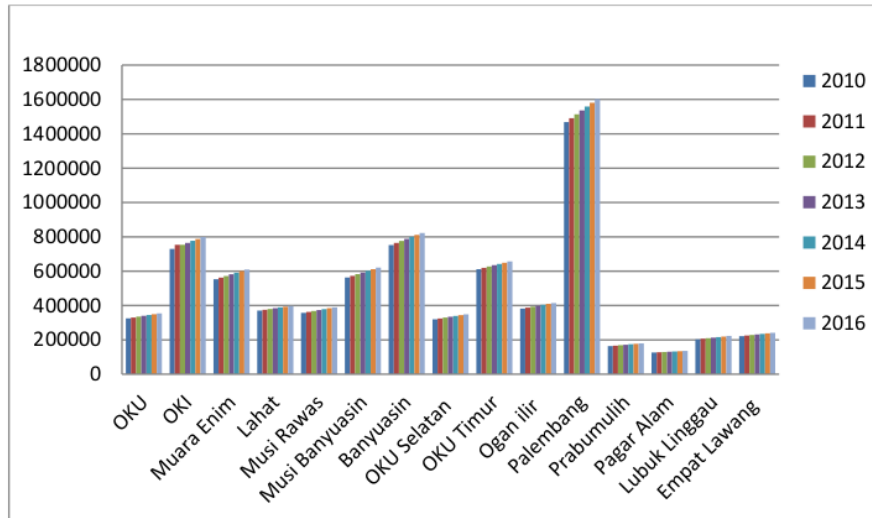
5.1. Kondisi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan

Penduduk merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika kualitas penduduknya rendah. Oleh karena itu agar penduduk menjadi potensi bukan menjadi beban dalam pembangunan, maka pemerintah harus melakukan upaya pengendalian jumlah penduduk dan mendorong peningkatan kualitas penduduk. Di samping itu harus melakukan upaya-upaya yang mendorong pada peningkatan kesejahteraan penduduk dengan melakukan skala prioritas perencanaan dan intervensi program pembangunan sosial di segala bidang.

Menurut Badan Pusat Statistik (2016) jumlah penduduk Sumatera Selatan tahun 2016 mencapai 8.160.901 jiwa, meningkat sekitar 108.586 jiwa dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 8.052.315 jiwa. Dengan demikian tingkat pertumbuhan penduduk Sumatera Selatan dalam setahun terakhir adalah 1,35 persen. Jumlah penduduk yang besar merupakan modal dasar bagi pembangunan bila didukung oleh kualitas penduduk yang memadai baik dari segi pendidikan, keahlian maupun keterampilan. Sebaliknya penduduk akan menjadi beban pembangunan bila tidak didukung oleh pendidikan, keahlian dan keterampilan yang cukup. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang serius terhadap masalah-masalah kependudukan.

Dengan jumlah penduduk yang begitu besar maka Sumatera Selatan dihadapkan pada suatu masalah kependudukan yang sangat serius. Sehingga, adanya upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan penduduk harus merupakan suatu upaya yang berkesinambungan dengan program pembangunan yang sedang dan akan terus dilaksanakan. Pada umumnya keadaan penduduk di provinsi Sumatera Selatan belum menyebar secara merata diseluruh wilayah, dimana penyebaran penduduk antar kabupaten/kota tampak masih cukup timpang, sehingga kepadatan untuk masing-masing kabupaten/kota belum merata. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 5.1 sebagai berikut:

Gambar 5.1. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Sumatera Selatan (Jiwa).



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Pada tahun 2016, jumlah penduduk terbesar berada di Kota Palembang dengan jumlah penduduk 1.602.071 jiwa, mengingat Kota Palembang sendiri merupakan ibukota Provinsi sekaligus pusat pembangunan ekonomi yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan penduduk yang pesat. Trend perkembangan jumlah penduduk di kota Palembang tahun 2010 hingga 2016 menggambarkan terjadinya peningkatan di setiap tahunnya dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,55 persen. Kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan pada umumnya jauh lebih kecil berkisar antara 135.328 jiwa yang terkecil di Kota Pagaralam sampai dengan yang terbesar di kabupaten Banyuasin dengan jumlah penduduk sebesar 822.575 jiwa di tahun 2016.

5.2. Penduduk Miskin di Sumatera Selatan

Penduduk miskin merupakan permasalahan yang ⁴ada di provinsi Sumatera Selatan. Jumlah penduduk miskin terbesar di provinsi Sumatera Selatan pada tujuh tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,085 juta jiwa atau 13,62% dari total penduduk pada tahun tersebut. Untuk melihat perkembangan jumlah penduduk miskin Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.1.
Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Selatan

Kab/kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ogan Komering Ulu	39.900	38.300	37.600	37.600	41.400	46.000	47.000
OKU Timur	59.900	57.500	56.400	56.500	65.300	72.800	73.930
OKU Selatan	36.700	35.300	34.600	34.700	38.200	40.600	38.400
Ogan Komering Ilir	116.500	111.900	109.800	109.900	119.200	134.100	127.500
Ogan Ilir	53.400	51.300	50.300	50.400	54.200	59.000	57.000
Musi Banyuasin	113.400	108.900	106.900	107.000	105.100	111.900	106.800
Banyuasin	93.000	89.300	87.600	87.900	95.400	100.600	96.000
Muara Enim	104.500	100.400	98.500	98.600	106.100	87.000	82.400
Lahat	70.500	67.700	66.400	66.600	70.300	70.700	67.800
Musi Rawas	102.000	98.000	96.200	96.400	97.000	58.000	55.500
Empat Lawang	32.600	31.300	30.700	30.600	30.400	31.600	30.200
Palembang	218.600	210.000	206.100	206.500	202.300	203.100	192.000
Lubuk Linggau	30.900	29.700	29.100	29.200	30.200	33.200	31.100
Pagar Alam	12.400	11.900	11.700	11.700	11.800	12.900	12.400
Prabumulih	21.000	20.200	19.800	19.900	19.000	21.400	20.500
Sumatera Selatan	1.105.300	1.061.700	1.041.700	1.043.500	1.085.900	1.082.900	1.038.530

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Perkembangan penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2010-2012 dan mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin cukup tinggi di tahun 2014 namun mengalami penurunan kembali di tahun selanjutnya hingga tahun 2016. Secara keseluruhan, menurut data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (2016) tingkat kemiskinan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 3,9% dari tahun 2010. Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 1,9%, pada tahun 2013 sempat mengalami peningkatan penduduk miskin sebesar 0,17% hingga tahun 2014 mengalami peningkatan terbesar mencapai 4,1%, dan mengalami penurunan penduduk miskin kembali pada tahun 2015 sebesar 0,3% hingga tahun 2016 terus mengalami penurunan penduduk miskin hingga 4,1%. Hal ini menjelaskan bahwa pada tahun 2010 hingga 2012 penduduk miskin selalu mengalami penurunan tetapi di tahun 2013 dan 2014 penduduk miskin mengalami peningkatan di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Selatan, sedangkan kabupaten/kota yang mengalami penurunan di tahun 2013-2014 yaitu; Musi Banyuasin, Empat Lawang, Palembang dan Prabumulih. Selanjutnya, secara keseluruhan kabupaten/kota di Sumatera Selatan kembali mengalami penurunan penduduk miskin hingga tahun 2016.

Daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar ditempati oleh Kota Palembang dengan rata-rata jumlah penduduk miskin dari tahun 2010 hingga 2016 sebesar

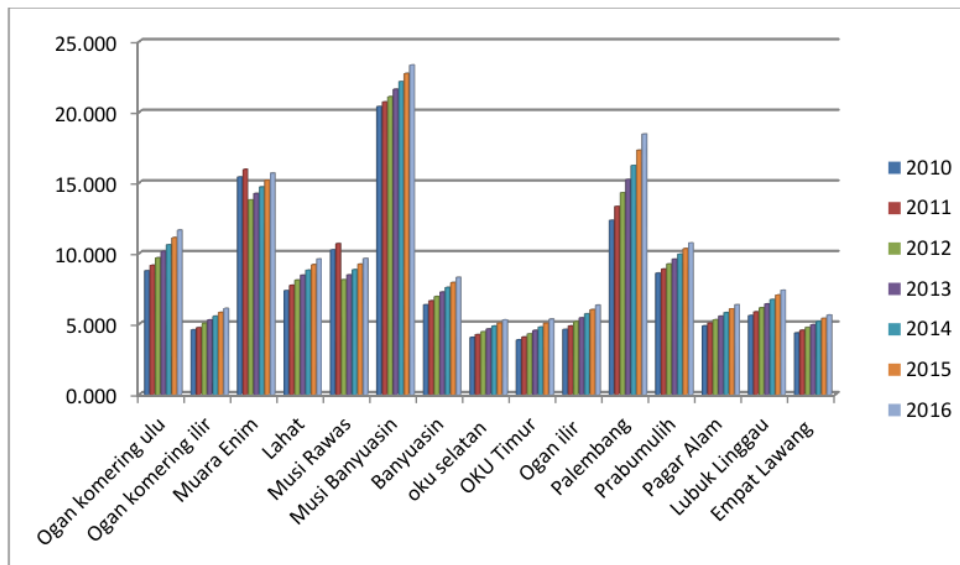
205,51 juta jiwa dan daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi berikutnya yaitu OKI dengan rata-rata 118,41 juta jiwa dan Musi Banyuasin dengan rata-rata 108,57 juta jiwa. Tingginya jumlah penduduk miskin ini mengingat jumlah penduduk yang terdapat disautu daerah juga tinggi. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin terendah terdapat di Pagar Alam dengan rata-rata 12,11 juta jiwa.

BAB VI
TINGKAT PENDAPATAN DI SUMATERA SELATAN

6.2. Perkembangan Pendapatan Perkapita

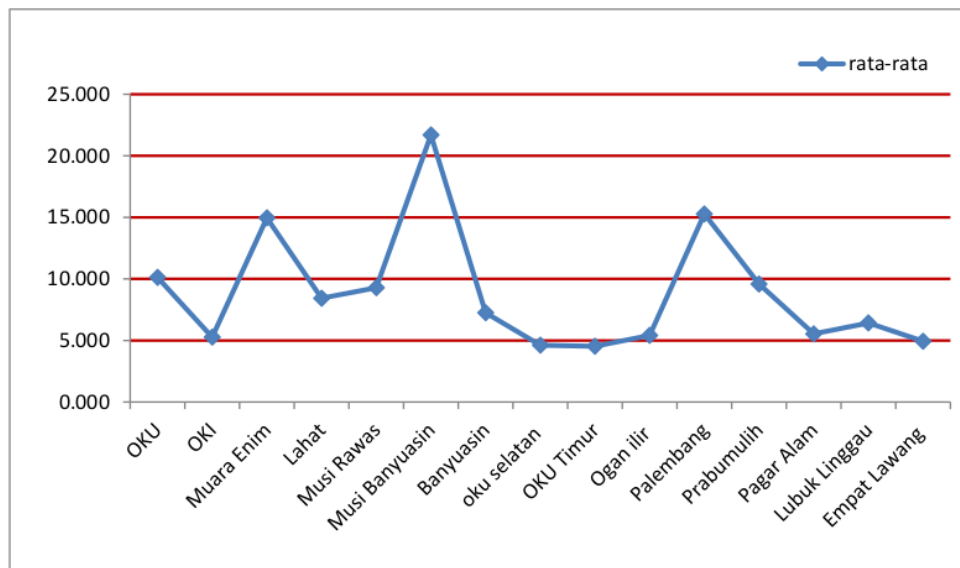
Pendapatan perkapita kabupaten/kota dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran ekonomi suatu wilayah dengan membagi besar nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut. Indikator ini mendeskripsikan rata-rata nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing penduduk di suatu wilayah akibat dari proses produksi. Kenaikan besaran PDRB perkapita menggambarkan secara nominal pendapatan masyarakat pada umumnya mengalami peningkatan. Tinggi rendahnya besaran indikator ini dipengaruhi oleh faktor besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu wilayah dan jumlah penduduk wilayah tersebut.

Gambar 6.1. Pendapatan Perkapita di Sumatera Selatan (Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Gambar 6.2. Rata-Rata Pendapatan Perkapita di Sumatera Selatan
(Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Dilihat dari sisi pendapatan perkapita, kabupaten Musi Banyuasin menempati posisi pertama dengan besarnya nilai rata-rata pendapatan perkapita tertinggi sebesar 21,69 juta rupiah dimana dengan pendapatan perkapita sebesar 23,30 juta rupiah ditahun 2016 dan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, peningkatan pendapatan perkapita tersebut disebabkan oleh pergerakan produksi barang/jasa yang dihasilkan di seluruh sektor di Kabupaten Musi Banyuasin dan relatif besarnya kontribusi sektor migas terhadap PDRB daerah tersebut. Dibandingkan dengan Kota Palembang pada posisi berikutnya dengan besaran pendapatan perkapita sebesar 18,41 juta rupiah di tahun 2016, dan terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah rata-rata pendapatan perkapita 2010-2016 sebesar 14,07 juta rupiah. Pergerakan nilai pendapatan perkapita di Kota Palembang dalam kurun tujuh tahun terakhir ini menggambarkan percepatan pembangunan yang cenderung masif. Sedangkan daerah yang memiliki pendapatan perkaita terendah pada tahun 2016 ditempati oleh OKU Timur sebesar 5,25 juta rupiah dengan rata-rata pendapatan perkapita 4,52 juta rupiah. Besarnya jumlah penduduk suatu daerah mempengaruhi besarnya nilai pendapatan perkapita mengingat Kota Palembang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Sumatera Selatan sebesar 1,49 juta jiwa.

BAB VII

KESIMPULAN

Teori Konsumsi Keynes telah menyatakan dengan tegas bahwa faktor pendapatan itu memiliki pengaruh langsung terhadap konsumsi, dimana semakintinggi pendapatan maka semakin tinggi konsumsi, begitu sebaliknya. Semakin tingginya pendapatan perkapita rumah tangga tersebut, semakin tinggi pula alokasi pengeluaran mereka untuk konsumsi pangan dimana penambahannya juga cukup signifikan. Dengan meningkatnya pendapatan berarti memperbesar peluang untuk membeli pangan dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Sebaliknya penurunan pendapatan akan menyebabkan penurunan dalam hal kualitas dan kuantitas pangan yang dibeli.

Selain pendapatan dibutuhkan infrastruktur yang memadai agar produksi pangan mencapai masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, dibutuhkan pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana perhubungan, seperti jalan dan jembatan, dapat memperlancar dan mempercepat distribusi, sehingga pangan dapat lebih mudah untuk diakses. Aspek ketersediaan dan aksesibilitas dapat meningkat yang berimplikasi pada peningkatan kinerja ketahanan pangan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ariningsih dan Rachman (2008) menemukan bahwa meskipun persediaan pangan cukup secara nasional maupun regional, namun hal tersebut tidak menjamin adanya ketahanan pangan rumah tangga atau individu.

Tanpa infrastruktur yang memadai ketersediaan pangan akan sulit mencapai kepada masyarakat yang membutuhkan. Infrastruktur yang semakin baik akan memberikan ketahanan pangan bagi masyarakat atau dengan kata lain infrastruktur yang tidak baik menyebabkan ketahanan pangan menurun. Hal tersebut dikarenakan tidak semua rumah tangga pada suatu daerah mampu mengakses pangan yang tersedia. Kondisi ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sihotang (2015) yang dilakukan di Provinsi Riau. Menyatakan bahwa produksi pangan belum optimal dikarenakan infrastruktur (seperti jalan) yang tidak memadai yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Selain itu, infrastruktur yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan sejalan dengan penelitian Anon (2011); Salepe (2014). Berdasarkan data dan analisis sebelumnya dapat dijelaskan bahwa Infrastruktur berupa jalan, jembatan atau sarana prasarana di Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini dapat memperlancar distribusi pangan dan konsumsi pangan dan ketahanan pangan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arene, Anyaeji. 2010. Determinants of Foods Security among Households in Nsukka Metropolis of Enugu State, Nigeria. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, Vol. 30(1), 9-16.
- Ariani, M. & H. P. S. Rachman. 2003. Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga. *Media Gizi dan Keluarga*. Volume 27 No 2
- Andersen, Per Pinstrup. 2009. Food Security: Definition and Measurement. *Food Sec*, 1: 5-7. DOI: 10.1007/1257-008-0002-y. Available at: [http://observatioseguridadalimentaria.org/sites/default/files/publicaciones/archivos/Pinstrup-Andresen Food% 20 Security-Definition-Measurement-2009.pdf](http://observatioseguridadalimentaria.org/sites/default/files/publicaciones/archivos/Pinstrup-Andresen%20Food%20Security-Definition-Measurement-2009.pdf)
- Anon, 2011. Infrastructure for Economic Development and Poverty Reduction in Africa. Nairobi: UN-HABITAT
- Baldwin, John R. and Dixon, Jay, 2008. Infrastructure Capital: What is it? Where is it? How Much of it is There?. *Canadian Productivity Review Research Paper No. 16*. <http://ssrn.com/abstract=1507883>.
- Baltagi, B. H, 2011. *Econometrics*. Springer. <http://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Badan Ketahanan Pangan Sumsel, 2017. *Statistik Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan*
- Biro Pusat Statistik, 2010. *Sumatera Selatan Dalam Angka*
- Biro Pusat Statistik, 2011. *Sumatera Selatan Dalam Angka*
- Biro Pusat Statistik, 2012. *Sumatera Selatan Dalam Angka*
- Biro Pusat Statistik, 2013. *Sumatera Selatan Dalam Angka*
- Biro Pusat Statistik, 2014. *Sumatera Selatan Dalam Angka*
- Biro Pusat Statistik, 2015. *Sumatera Selatan Dalam Angka*
- Biro Pusat Statistik, 2016. *Sumatera Selatan Dalam Angka*
- Biro Pusat Statistik, 2017. *Sumatera Selatan Dalam Angka*
- Biro Pusat Statistik, 2015. *Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan DiIndonesia*.
- Brittain, Len S. 2002. Financing Capital Expenditures. *Canadian TaxJournal* Vol. 50 No. 2, Canada
- Cook, JT. And Frank, DA. 2008. Food Security, Poverty and Human Development in the United State. *Annual of the New York Academy of Science*, 1-17.

- <http://assets.asaspeninstitute.org/content/uploads/file/content/docs/ee/JCDAF-AnnNYSci-2008.pdf>
- Damanik, Supriyanto. 2016. Analisis Keterkaitan Ketahanan Pangan dan Kemiskinan Berdasarkan Implementasi Kebijakan Penganggulan Kemiskinan di Indonesia, *Economics Development Analysis Journal*.
- Datt, Graurav and Ravvallon, Martin, 2000. Farm Productivity and Rural Poverty in India, *Journal of Development Studies*, India.
- Direktorat Jederal Perimbangan Keuangan, Data Anggaran Pengeluaran Pemerintah (Urusan) TA 2006 – 2016.
- Ilyas, Marzuki. 1989. Ilmu Keuangan Negara. PPLPTK. Jakarta.
- Isserman, A. M. (1977). The Location Quotient Approach to Estimating Regional Economic Impacts. *Journal of the American Planning Association*, 43(1), 33–41.
- Kuncoro, Mudrajat. 2000. Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebiiakan. BPFE-UGM, Jogjakarta.
- Lestari, Fatim Catur, 2008. Kemiskinan Dan Pengeluaran Pemerintah Untuk Infrastruktur: Studi Kasus Indonesia, 1976-2006. Bogor. Skripsi.
- Malik, SM. 2011. An Emprical Investigation of the Relationship between Food Insecurity, Landlessness and Violent Conflict in Pakistan. PIDE Working Papers No.71, Pakistan institute of Development Economics Islamad
- Mangkoesebroto, Guritno, 2001, *Ekonomi Publik*, Edisi–III, BPFE, Yogyakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Erlangga
- Matsuyama, Kiminori, 1992. Agriculture Productivity, Comparative advantage and Economic Growth, *Journal of Economic Theory*, Vol. 58, issue 2
- Mubyarto. 1997. Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3ES. Jakarta
- Nanga, Muana, 2006. Dampak Transfer Fiskal terhadap Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan, Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Disertasi
- Omotesho, O.A, Adewumi,A, Lawal,M & Ayinde, OE.2006. Determinants of Food Security Among the Rural Farming Household in Kwara State, Niagara. *African Journal of General Agriculture*.
- Pakpahan, A; H.P. Saliem, S.H. Suhartini dan N. Syafa'at. 1993. Penelitian Tentang Ketahanan Pangan Masyarakat Berpendapatan Rendah. Monograph Series No. 14. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Pasaribu, SM, B Sayaka, W.K Sejati, A Setyanto, J. Hasrina, J.Situmorang. 2006. Analisis Pembiayaan sektor Pertanian, Laporan Teknis, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan

- Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, Bogor
- Prasetyo, R.B., 2008. Ketimpangan dan Pengaruh Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi Kawasan Barat Indonesia (KBI). Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Rachman, H dan Ariani M, 2002. Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran dan Strategi. Forum Agro Ekonomi Vol. XX/No. 1.
- Raychaudhuri, Ajitva, Prabir De, 2010. Trade, Infrastructure and Income Inequality in Selected Asia Countries : An Empiris Analysis, Asia-Pacific Research and Training Network on Trade Working Paper Series, No. 82
- Sawit, M.H. dan M. Ariani. 1997. Konsep dan Kebijakan Ketahanan Pangan. Makalah Pemandang pada Pra-WKNPG VI, di Bulog, Jakarta, 26-27 Juni.
- Sawit, M. H. 2003. Indonesia Dalam Perjanjian Pertanian WTO : Proposal Harbinson. Analisis Kebijakan Pertanian, 1 (1): 55 – 66.
- Sawitri, Hendrin Hariati, 2007. Ekonomi Pembangunan I, Edisi 1, Jakarta.
- Sajogyo, Pudjiwati Sajogya, 2011. Sosiologi Pedesaan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Salepe, Mosa, 2014. The effect of infrastructural challenges on food security in Ntambanana, Kwazulu-Natal, South Africa. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure Vol. 3 (1) - (2014) ISSN: 2223-814
- Safrizal, 2008. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, Niaga Swadaya
- Susilawati, Sastrawati dan Wunas, 2016. Penentuan Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, Prossiding Temu Ilmiah IPLBI.
- Sihotang, Sulastri. 2015. Pengaruh Luas Lahan Panen Padi, Jumlah Jalan dan Konsumsi Beras Terhadap Ketahanan Pangan di Provinsi Riau, Jom FEKON Vol. 2 No 2
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Suparmoko, 2002. Ekonomi Publik untuk Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta
- Timmer, C Peter. 2004a. Food Security in Indonesia: Current Challenges and The Long-Run Outlook. Working Paper. Center for Global Development.
- Timmer, C Peter. 2004b. Food Security and Economic Growth: An Asian Perspective. Working Paper. Center for Global Development.
- USDA.2012. US Household food security survey module: Three-stage design, with screeners. Economic research service.

UNDP,1995. Public Sector Management, Governance and Sustainable Development, New York: UNDP

Wahyuni, Krismanti Tri.2009. Analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Terhadap Produktivitas Ekonomi di Indonesia. Bogor:Fakultas Ekonomi dan Manajemen.Institut Pertanian Bogor

Yudhoyono, Susilo Bambang, 2004. Pengurangan Kemiskinan di Indonesia: mengapa tidak cukup dengan memacu pertumbuhan ekonomi, Brighten Press, Jakarta.

ketersediaan infrastruktur

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Raihana Kaplale. "AKSESIBILITAS PANGAN RUMAH TANGGA DI DESA MANUWERI KECAMATAN BABAR TIMUR KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA", Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan, 2019
Publication 1%
 - 2** Syaakir Sofyan. "PERAN LEMBAGA ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2018
Publication 1%
 - 3** ITANG ITANG. "PENYEBAB KEMISKINAN DAN CARA MENANGGULANGINYA", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2013
Publication 1%
 - 4** Jeli Miranti, Supriyanto Supriyanto, Alian Sair. "Analisis Perkembangan Kota Pagar Alam Masa Walikota Ida Fitriati Tahun 2013-2017", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2019
Publication 1%
-

5

Pieter De Fretes. JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI), 2017

Publication

1%

6

Ambok Pangiuk. "PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENURUNAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2009-2013", *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2018

Publication

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On